

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Terdapat perbedaan pendapatan antara petani kelapa sawit plasma dengan swadaya. Perbedaan ini disebabkan, antara lain: 1) distorsi harga antara petani plasma dengan petani swadaya sebesar; 2) kemampuan petani swadaya terhadap pengelolaan kebun masih rendah; 3) pendapatan petani swadaya sangat dipengaruhi oleh harga TBS yang mereka terima karena pasar TBS lebih cenderung monopsonistik; dan 4) keterbatasan pengetahuan petani swadaya terhadap usahatani kelapa sawit.

Kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan angka *multiplier effect* sebesar 3,03, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha. Tingkat pertumbuhan indeks kesejahteraan petani kelapa sawit di Riau pada tahun 1995 sebesar 0,49 yang berarti tingkat pertumbuhan kesejahteraan meningkat sebesar 49 persen. Tahun 2003 indeks pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit meningkat menjadi 1,72. Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit mengalami kemajuan sebesar 172 persen. Pada periode tahun 2003-2006 indeks kesejahteraan petani kelapa sawit 0,18 dan periode tahun 2006-2008 juga mengalami positif sebesar 0,12. Ini berarti kesejahteraan petani pada periode tersebut sebesar 12 persen.

Hasil penelitian yang dilakukan di daerah pedesaan menyimpulkan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan perekonomian pedesaan. Secara ekonomi akan menciptakan daya beli di daerah pedesaan, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan terhadap barang kebutuhan masyarakat.

Perkebunan yang diusahakan secara swadaya seperti jalan sendiri tanpa bergantung kepada inti. Untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit ke depan dirancang berbentuk kemitraan antara petani dengan perusahaan inti, dimana petani memiliki kebun kelapa sawit dan ikut pemilikan modal pada

pabrik kelapa sawit (PKS). Konsep ini menekankan kepada azas kepemilikan bersama oleh petani baik usahataniya maupun pabrik pengolahannya, yang pengelolaannya dilakukan oleh koperasi petani.

Bagi masyarakat di daerah pedesaan, sampai saat ini usaha perkebunan merupakan alternatif untuk merubah perekonomian keluarga, karena itu animo masyarakat terhadap pembangunan perkebunan masih tinggi. Dari sisi lain pembukaan perkebunan akan membutuhkan lahan, apabila hal ini tidak dikendalikan oleh pembuat kebijakan, maka akan terjadi alih fungsi lahan di daerah pedesaan.

5.2 Saran

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Untuk merangsang investor melakukan investasi yang berbasis pedesaan, maka harus ada kebijakan pemerintah daerah terhadap kegiatan investasi tersebut. Kebijakan itu antara lain; memperpendek rantai birokrasi perizinan; membebaskan PPN dalam jangka waktu tertentu; atau pengurangan pemotongan pajak penghasilan. Sehingga biaya produksi dapat ditekan.